

PENGARUH SUMBER PENDAPATAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

(Studi Kasus Di Desa Kertaraharja, Desa Bojong, Desa Cikembar, Kecamatan Cikembar
Kabupaten Sukabumi)

Ai Sahri Ramdani

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: aisahri_ramdani@yahoo.com

ABSTRACT

Received :
02-01-2024

Received in Revised
Format : 03-01-2024

Accepted :
05-01-2024

Available Online :
06-01-2024

This study aims to determine the effect of village income sources on community welfare. There are seven sources of village revenues: PADes, APBN, tax and retribution revenue sharing, ADD, budget and expenditure assistance, Grants and Donations, and other legitimate village revenues. With the largest revenues sourced from the state budget. With such a budget the village government is mandated to be able to prosper the community. To measure the welfare of the community, seen from the index of village independence, this index has three dimensions, namely, own ability index, joint responsibility index, and sustainability index. Furthermore, the independence of the village becomes a

benchmark for how the village government can increase the productivity of the community to achieve the welfare objectives of the village community. Variables used in this research are village income and community welfare. This study uses a method of quantitative, descriptive associative. The sample of this research is village staff, BPD, RT, and RW in Kertaraharja Village, Bojong Village, and Cikembar Village with 70 respondents. The data collection tool is a questionnaire with an ordinal scale (Likert). Based on the results of hypothesis testing using a t-test, the source of income of the village has a positive effect on the welfare of the community in Kertaraharja Village, Bojong Village, and Cikembar Village, Cikembar District, Sukabumi District, showing a positivity of 5,741.

Keywords: Village Income Source, Community Welfare

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara demokrasi dan kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten dan 96 kota, salah satu provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Barat, khususnya Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari 47 kecamatan dan 381 desa. kabupaten terluas se- Jawa Bali adalah Kabupaten Sukabumi. Akan

tetapi dengan menyandang kabupaten terluas belum bisa menjamin kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dengan perolehan dua Kabupaten tertinggal se- Jawa Barat yaitu Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut. Masalah tersebut sangat disayangkan dimana banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia yang

berkualitas di Kabupaten Sukabumi, namun belum dapat mengelola dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

Pada umumnya kesejahteraan menjadi hak seluruh warga Negara Indonesia, dan Negara telah menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Seperti yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Untuk Pancasila terutama sila ke dua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta sila kelima yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sudah sepatutnya seluruh masyarakat dan pemimpin negeri ini mengamalkan dan menjalankan ideologi tersebut.

Pemerintah telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik oleh pemerintah pusat dan daerah, salah satunya dengan dimulai dari desa. Dimana desa merupakan ujung tombak suatu pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Program desa dapat berjalan dengan baik apabila masyarakatnya sejahtera. Walaupun terdapat banyak faktor dari luar yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa, namun desa dapat berperan penting kepada kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini desa diberikan wewenang yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi

desa yang dimiliki dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tentu saja wewenang yang luas tersebut tetap diatur sesuai dengan undang-undang.

Dalam rangka mewujudkan program-program desa yang salah satunya yaitu kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat suatu desa sangatlah penting untuk menunjukkan bahwa desa tersebut telah mencapai keberhasilan dari program – program yang telah desa rencanakan untuk pembangunan dan pengembangan desa. Maka dari itu kesejahteraan masyarakat tidak hanya di ukur dari terpenuhinya kebutuhan barang atau jasa yang dibutuhkan melainkan bagaimana masyarakat tersebut menjalankan hidupnya sebagai manusia yang layak dan dihargai oleh manusia yang lainnya.

Kesejahteraan sendiri menurut UU Nomor 11, pasal 1, tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial. “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Hal ini sejalan dengan pendapat Friedlander (Fahrudin, 2014 : 9) mengenai kesejahteraan sosial, yang mengemukakan kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan - pelayanan sosial dan institusi - institusi yang dirancang untuk membantu individu - individu dan kelompok - kelompok yang mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi - relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan - kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Dari pengertian diatas, bahwa kesejahteraan merupakan terpenuhinya segala kebutuhan primer guna mencapai kehidupan yang layak sehingga mampu menciptakan hubungan sosial yang baik dan menjalankan fungsi sosialnya.

Untuk mengukur kesejahteraan dan menunjukkan kemanfaatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat desa, maka digunakan indeks kemandirian desa sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Menurut BPS (2015: 7) gambaran kesejahteraan suatu desa dapat dilihat dari indeks kemandirian desa yang dapat mengukur hasil pembangunan suatu desa. Indeks kemandirian desa ini di bentuk dari tiga dimensi yaitu: indeks kemampuan sendiri, indeks tanggung jawab bersama, dan indeks keberlanjutan.

Menurut Agusta dan Fujiartanto (2014) Indeks Kemandirian Desa mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan umum yang meliputi: ekonomi masyarakat atau standar material, pendidikan, kesehatan, lembaga kemasyarakatan atau modal sosial, lingkungan hidup, keamanan dan ketertibana, pemerintahan, dan peranserta masyarakat dalam pembangunan.

Suatu desa tidak dapat mensejahterakan masyarakatnya tanpa dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta pendapatan asli desa (Pertala, 2022). Dengan adanya dukungan – dukungan tersebut khususnya berupa bantuan anggaran dana seperti Alokasi Dana Desa (ADD), dapat menunjang kesejahteraan masyarakat setempat. Pendapatan desa itu sendiri menurut Soleh dan Heru (2014: 10) “pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa”. Jadi pendapatan desa merupakan penerimaan uang dari berbagai

sumber yang masuk ke rekening desa dan tidak perlu ada pengembalian.

Adapun sumber Pendapatan Desa menurut UU. No.6/2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1, disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari: 1) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. 2) Alokasi Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. 4) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. 5) Bantuan keuangan dari anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 6) Hibah dan sumbangan yang mengikat dari pihak ketiga. 7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dengan sumber pendapatan desa yang dimiliki pemerintah desa sudah seharusnya dapat melakukan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada menjadi hasil usaha atau ekonomi yang bermanfaat untuk kesejahteraan bersama.

Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan mendapat kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana bantuan dana tersebut tidak akan melewati perantara. Namun pada umumnya jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian. Dengan adanya dana tersebut akan menambah anggaran pendapatan desa untuk memenuhi program – program yang telah di bentuk oleh desa agar terwujud

dengan baik sesuai tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian desa memerlukan sumber pembiayaan untuk mendukung program-programnya. Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Suatu program desa dikatakan tercapai apabila pengeluaran atau belanja desa tidak lebih besar dari pendapatan desa itu sendiri. Anggaran pendapatan harus tersalur dengan benar dan mendahulukan kebutuhan desa yang paling dibutuhkan oleh desa dan masyarakatnya.

Fenomena yang terjadi di lapangan, dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat, seharusnya setiap desa bisa memberikan pelayanan dan hak-hak warganya. Tetapi kenyataan di lapangan pemerintah desa belum bisa sepenuhnya memberikan pelayanan tersebut secara merata. Hanya sebagian kecil warganya yang bisa menikmati manfaat ADD tersebut, dan yang lebih buruk adanya indikasi penyalahgunaan ADD untuk kepentingan pihak yang tidak bertanggung jawab. Terdapat 24 desa di Kabupaten Sukabumi yang diduga menyalahgunakan ADD, dan salah satu desa tersebut ada di Kecamatan Cikembar. Penyalahgunaan dana ini sangat merugikan masyarakat, dana yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan digunakan tidak semestinya sehingga menimbulkan kerugian untuk warganya dan juga Negara (Radar Sukabumi 6 Oktober 2016)

Fenomena kesejahteraan yang terjadi menurut Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Sumber Daya (<http://bisnis.liputan6.com/>). “menyatakan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia paling rendah dibanding negara

lain sesama anggota ASEAN”. Hal ini karena tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia dibawah negara Singapura, Malaysia, Thailand Dan Filipina.

Menanggapi hal tersebut pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah dengan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. ‘Meluncurkan program PKKPM (Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat)’. (<https://news.detik.com/>) Program ini merupakan program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Terdapat tiga strategi yang akan dilakukan dalam program ini, diantaranya dengan memprioritaskan pembangunan desa yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar desa, sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal desa, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Selain itu masih ada permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa, seperti kesenjangan sosial dan pengangguran serta kemiskinan. Tidak setiap desa memiliki infrastruktur memadai salah satunya yaitu akses jalan yang rusak. Padahal jalan merupakan salah satu penggerak roda perekonomian masyarakatnya. Sementara untuk sarana kesehatan di desa belum memiliki POSBINDU dan POLINDES, pos kesehatan ini tidak kalah penting dengan POSYANDU, sarana kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat desa, yang semestinya bisa dirasakan dan nikmati secara langsung oleh masyarakat. Di Desa Cikembar terdapat program pemberdayaan masyarakat berupa peternakan kambing dan ikan lele, tapi karena kurangnya

kontrol dan pengetahuan program pemberdayaan ini berhenti dengan tidak jelas. Banyak program – program pemberdayaan masyarakat dari desa yang tidak tuntas. Dari uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sumber pendapatan Desa terhadap kesejahteraan Masyarakat.

BAHAN DAN METODE

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua objek yang akan diteliti yaitu sumber pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat. Objek penelitian yang dijadikan variabel bebas (*independent variable*) (X) adalah sumber pendapatan desa. Adapun variabel terikat (*dependent variable*) (Y) yaitu kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2014:2) “pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, menurut Sugiyono (2014:8) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Menurut Sugiyono (2014:35) rumusan masalah deskriptif adalah “suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri)”. Sedangkan rumusan masalah asosiatif menurut Sugiyono (2014:36) adalah “suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat

menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih”.

Populasi dan Sample

Populasi menurut sugiyono (2014:80) adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Populasi dalam penelitian ini adalah Staf Desa, Masyarakat, Ketua RT dan Ketua RW yang berada di tiga desa di Kecamatan Cikembar yaitu diantaranya Desa Cikembar, Desa Bojong, dan Desa Kertaraharja. Sampel menurut Sugiyono (2014:81) adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Teknik dalam pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling*. *nonprobability sampling* menurut Sugiyono (2014:84) adalah “teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.”. Penentuan sampel yang digunakan yaitu teknik *sampling purposive*. Menurut Sugiyono, (2014:85). *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Seperti data yang bersumber dari orang yang mengerti atau memahami variabel – variabel yang akan diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sampel besar dengan jumlah ≥ 30 .

Jumlah sampel yang diambil dari keseluruhan jumlah Staf Desa, Masyarakat, RT dan RW yang berjumlah 335 orang. Berdasarkan pertimbangan yang dikarnakan keterbatasan waktu, tidak semua jumlah anggota populasi dijadikan sampel, melainkan diambil beberapa prang sampel untuk mewakili seluruh anggota populasi. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus slovin. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 77 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya menggunakan data primer dan data sekunder, data yang paling utama digunakan adalah data primer sedangkan data sekunder sebagai data pendukung.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data – data dari seluruh responden atau berbagai sumber data lain terkumpul. Menurut Sugiyono (2014:147) kegiatan dalam analisis data adalah “mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik nonparametris tidak menuntut terpenuhi banyak asumsi, misalnya data yang dianalisis tidak harus berdistribusi normal (Sugiyono,2014:150). Peneliti menggunakan statistik nonparametris karena sesuai dengan analisis yang digunakan yaitu analisis data ordinal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji normal atau tidaknya suatu distribusi data, variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Dapat diketahui bahwa semua variabel berdistribusi normal. Untuk sumber pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat memiliki nilai signifikan $>0,05$ sedangkan sumber pendapatan desa (X) memiliki nilai signifikan $0,055 > 0,05$ dan kesejahteraan masyarakat (Y) memiliki nilai signifikan $0,200 > 0,05$. karena data sudah memenuhi syarat kenormalan maka

Analisis Data.

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh sumber pendapatan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Sugiyono, (2014:188), “Regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi (diubah-ubah)”

Menurut Sugiyono, (2014:188) Analisis regresi linear sederhana antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b X$$

dapat dilakukan uji regresi dan uji hipotesis.

Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk menentukan pengaruh linear antara satu variabel dependen dengan variabel independen.

$$Y = 18.152 + 0.735X$$

Persamaan regresi linier sederhana dapat dijelaskan bahwa konstanta sebesar 18.152 menyatakan setiap kenaikan Y maka X nya akan naik sebesar 0.735.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada regresi linear sederhana sering diartikan sebagai kemampuan variabel bebas dalam

menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi dihitung untuk melihat besarnya kontribusi/pengaruh sumber pendapatan desa (variabel x) terhadap kesejahteraan masyarakat (variabel y).

Diketahui nilai R^2 (R Square) untuk desa kertaraharja, desa bojong, desa cikembar adalah 0.305, artinya sumbangan pengaruh dari variabel X yaitu sebesar 30,5% sedangkan sisanya 69,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Pengaruh sumber pendapatan desa terhadap kesejahteraan masyarakat, bisa dibuktikan dengan uji t yang dilakukan oleh peneliti dimana hasil dari pengaruh sumber pendapatan desa terhadap kesejahteraan masyarakat mendapatkan hasil t hitung $>$ t tabel ($5.741 > 1.992$), maka hipotesisnya H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi diatas, diketahui bahwa nilai $k_d=30,5\%$. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh sumber pendapatan desa terhadap kesejahteraan masyarakat masuk dalam kriteria sedang, dan sisanya sebesar 69,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, ini dibuktikan dengan pembangunan infastruktur berupajalan, jembatan dan lainnya di Desa Kertaraharja, Desa Bojong, dan Desa Cikembar yang dulunya banyak jalan yang rusak parah dan sekarang sudah banyak yang diperbaiki.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sumber pendapatan desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Kertaraharja, Desa Bojong, dan Desa Cikembar. Berdasarkan pembahasan dan analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Besaran sumber pendapatan desa yang diperoleh oleh setiap desa berbeda – beda. Pendapatan desa tersebut telah digunakan dengan baik, untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama dalam hal kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini ditunjukkan dengan perbaikan infrastruktur terutama pembangunan jalan, pembangunan MCK, perbaikan bangunan PAUD, dan badan usaha milik desa (BUM Desa). Menurut data hasil koesioner menunjukkan bahwa hasil akumulasi dari data yang ada dengan variabel sumber pendapatan desa (X) dinyatakan baik, dengan jumlah akumulasi sebesar 83.85%.
2. Tingkat kesejahteraan dari setiap desa berbeda hal ini dikarenakan kepadatan penduduk dan letak geografis serta perekonomian disetiap desa. Dari hasil penelitian dapat di ketahui rata-rata tertinggi tingkat kesejahteraan di tiga desa ini adalah Keluarga Sejahtera II, III dan III Plus sebesar 69%. Sedangkan untuk persentase paling kecil adalah keluarga Pra sejahtera sebesar 12%. Dengan adanya sumber pendapatan desa pemerintah desa bisa terus meminimalkan keluarga pra sejahtera ini. Dan bisa terus meningkatkan jumlah keluarga Sejahtera II. Dari data koesioner menunjukkan bahwa hasil akumulasi dari data yang ada dengan variabel kesejahteraan masyarakat (Y) dinyatakan baik, dengan jumlah akumulasi sebesar 81.83%.
3. Pengaruh sumber pendapatan desa terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, sumber pendapatan desa berpengaruh positif

terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Kertaraharja, Desa Bojong, dan Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dengan menunjukkan angkapositif sebesar 5.741. hal tersebut juga didukung oleh temuan fakta dilapangan, bahwa pemerintah desa melaksanakan perbaikan infrastruktur terutama pembangunan jalan, pembangunan MCK, perbaikan bagunan PAUD, dan badan usaha milik desa (BUM Desa). Demikian hipotesis tersebut menyatakan bahwa “sumber pendapatan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat” diterima.

Saran

Setelah melakukan penelitian di Desa Kertaraharja, Desa Bojong, dan Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai masukan atau bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber pendapatan desa merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan di Desa Kertaraharja, Desa Bojong, dan Desa Cikembar, oleh karena itu diharapkan setiap desa dapat meningkatkan jumlah pendapatan desa dengan cara mengembangkan berbagai potensi desa sehingga dapat membantu memperlancar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan semakin tingginya jumlah pendapatan desa maka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa akan semakin meningkat.
2. Untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, pemerintah desa dapat lebih memperhatikan

pembangunan yang tepat bagi masyarakatnya dan pemberian fasilitas serta akses kepada kebutuhan umum masyarakat. Selain itu pendampingan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan mampu memberi kontribusi pada kesejahteraan masyarakat desa serta meminimalkan jumlah keluarga Pra sejahtera menjadi Keluarga Sejahtera II atau lebih

Dengan besarnya sumber pendapatan desa, seharusnya bisa membuat desa tersebut lebih mandiri yang ditunjukkan dengan program-program kemasyarakatan. Besaran dana desa tidak hanya untuk oprasional atau pembangunan fasilitas saja. Tetapi bisa juga dengan peningkatan program berkelanjutan dan menggali potensi-potensi yang ada dilingkungan desa. Kegiatan tersebut Seperti pengembangan UMKM disetiap RW atau juga pengembangan pertanian – peternakan dan pariwisata. Sehingga mampu membuat warganya lebih mandiri serta lebih produktif lagi. Yang pada akhirnya bisa lebih mensejahterakan masyarakatnya serta menekan angka kemiskinan atau penurunan jumlah KK Prasejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta dan Fujiartanto. (2014). *Indeks Kemendirian Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Daerah Kecamatan Cikembar*. Badan Pusat Statistik kabupaten Sukabumi. Sukabumi.
- Chabib, Soleh dan Heru. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokusmedia. Bandung.

- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisa Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Notowidagdo, Rohiman. (2016). *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*. Amzah. Jakarta.
- Pertala, E. C., Sunarto, A. A., & Alhidayatullah, A. (2022). IMPLEMENTASI MODEL DESA PINTAR. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 5(3), 978-981.
- Prastyaningrum, Wahyu. (2009). *Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung*. Universitas Negeri Semarang.
- Rakyat, P. (2016, 17 februari). *Garut dan Sukabumi Kabupaten Paling Tertinggal di Jabar*. Pikiran Rakyat [online]. Tersedia: <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/02/17/361367/garut-dan-sukabumi-kabupaten-paling-tertinggal-di-jabar>. [3 Januari 2017]
- Riadi, dkk. (2015). *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhairi. (2016). *Analisa Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu*. Universitas Pasir Pengaraian Rokan Hulu.
- Sujarweni, Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukabumi, R. (2016, 6 oktober). *24 Desa Salah Gunakan ADD*. Radar Sukabumi [online]. Tersedia: <http://radarsukabumi.com/2016/10/06/24-desalah-gunakan-add/>. [20 Februari 2017]
- Taufik, Imam. (2010). *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Penerbit genaca exact. Bekasi.
- Undang-Undang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Fokusmedia. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial. [online]. Tersedia: <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-11-tahun-2009-tentang-kesejahteraan-sosial.pdf> [02 Februari 2017]